

PENDIDIKAN POLITIK MELALUI DIALOG PUBLIK TENTANG STRATEGI TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF NASIONALISME KERAKYATAN DI KOTA MATARAM

Sadrul Imam¹, Dwi Tesna Andini², Sartika Hijriati³

¹Universitas Muhammadiyah Mataram; ²Universitas Teknologi Mataram

³Universitas Mataram, Indonesia

sadrulimam91@gmail.com; dwitesnaandini@gmail.com

Abstract

Although public participation in understanding public policy and government dynamics is an important indicator of democratic development, public political literacy still faces challenges, particularly in understanding the direction of government policies and their implications for social, economic, and political life. This community service activity aims to provide political education and strengthen public political literacy through a public dialogue themed “Understanding the Prabowo-Gibran Government Transformation Strategy from the Perspective of People-Oriented Nationalism.” The activity was held on June 1, 2026, in Mataram City and involved 65 participants consisting of students, academics, cadres of community and political organizations, and the general public. The implementation methods included interactive lectures, participatory dialogue, panel discussions, and question-and-answer sessions. Activity evaluation was conducted through participatory observation and a Google Form questionnaire based on a 1–5 Likert scale completed by 56 participants. The evaluation results showed that 88% of participants understood the concept of people-oriented nationalism after participating in the activity, 91% considered public dialogue effective as a medium for political education, and 93% stated their willingness to participate in similar activities in the future. The findings of this activity indicate that public dialogue can create a participatory, critical, and constructive space for political education in understanding public policy. The implications of this activity emphasize the importance of the role of higher education institutions as agents of public political education in strengthening democracy, political literacy, and public participation on an ongoing basis.

Keywords: Political Education; Political Literacy; Community Service; Public Dialogue; People-Oriented Nationalism.

Abstrak: Meskipun partisipasi masyarakat dalam memahami kebijakan publik dan dinamika pemerintahan menjadi indikator penting pembangunan demokrasi, literasi politik masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama dalam memahami arah kebijakan pemerintah dan implikasinya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik serta memperkuat literasi politik masyarakat melalui dialog publik bertema “Memahami Strategi Transformasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Nasionalisme Kerakyatan”. Kegiatan dilaksanakan pada 1 Juni 2026 di Kota Mataram dengan melibatkan 65 peserta yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, kader organisasi kemasyarakatan dan politik, serta masyarakat umum. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, dialog partisipatif, diskusi panel, dan sesi tanya jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif dan kuesioner *Google Form* berbasis skala *Likert* 1–5 yang diisi oleh 56 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 88% peserta memahami konsep nasionalisme kerakyatan setelah mengikuti kegiatan, 91% menilai dialog publik efektif sebagai media pendidikan politik, dan 93% menyatakan bersedia mengikuti kegiatan serupa pada masa mendatang. Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa dialog publik mampu menciptakan ruang pendidikan politik yang partisipatif, kritis, dan konstruktif dalam memahami kebijakan publik. Implikasi kegiatan ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen pendidikan politik masyarakat dalam memperkuat demokrasi, literasi politik, dan partisipasi publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik; Literasi Politik; Pengabdian Kepada Masyarakat; Dialog Publik; Nasionalisme Kerakyatan.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat demokratis karena berfungsi meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak, kewajiban, serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Surbakti, 2010; Hendrik & Danial, 2022).

Dalam konteks demokrasi modern, literasi politik menjadi kebutuhan yang semakin penting mengingat kompleksitas isu-isu kebijakan publik yang berkembang di tengah masyarakat. Literasi politik menjadi kebutuhan penting karena berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memahami isu publik, kesadaran politik, dan partisipasi warga negara dalam demokrasi (Rafla & Tetep, 2025; Jebarus & Sunarso, 2025). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan disinformasi, polarisasi politik, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Dahl, 2001). Oleh karena itu, diperlukan berbagai bentuk edukasi publik yang

mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi politik yang objektif, ilmiah, dan mudah dipahami.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyelenggaraan pendidikan politik berbasis dialog publik yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan antara akademisi dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi tetapi juga subjek yang aktif berdiskusi, menyampaikan pandangan, serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan publik.

Pendidikan politik berperan dalam membangun civic engagement dan partisipasi politik masyarakat melalui penguatan civic disposition serta modal sosial warga negara (Hidayah & Sujastika, 2024; Dolan, 2022). Pendidikan politik yang inklusif dan berbasis partisipasi publik diperlukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi (Erfain, 2025).

Dalam praktiknya, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan kewargaan, tetapi juga membantu masyarakat memahami berbagai arah kebijakan publik yang berkembang dalam konteks pemerintahan nasional. Salah satu isu yang saat ini memperoleh perhatian publik adalah nasionalisme kerakyatan sebagai perspektif dalam pembangunan dan transformasi pemerintahan.

Tema nasionalisme kerakyatan menjadi salah satu isu yang relevan untuk didiskusikan mengingat pemerintahan nasional saat ini yang mengusung berbagai program strategis yang diklaim berorientasi pada kesejahteraan rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pemberdayaan ekonomi desa. Berbagai kebijakan tersebut memunculkan beragam perspektif di masyarakat yang perlu dipahami secara komprehensif melalui pendekatan akademik dan dialogis.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim dosen dari perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa dialog publik bertajuk “Memahami Strategi Transformasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Nasionalisme Kerakyatan”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi politik masyarakat, memperkuat budaya dialog demokratis, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2026 di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan berlangsung pada hari Senin, pukul 15.30–21.00 WITA, bertempat di Cosa Nostra Cafe & Billiard Mataram. Pemilihan lokasi kegiatan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan kenyamanan peserta sehingga dapat mendukung proses dialog publik yang interaktif dan partisipatif. Kegiatan diikuti oleh 65 peserta yang terdiri atas mahasiswa, akademisi, kader organisasi kemasyarakatan dan politik, serta masyarakat umum di Kota Mataram yang memiliki perhatian terhadap isu kebijakan publik dan pembangunan nasional.

Metode pendidikan politik partisipatif dipilih karena mampu mendorong civic engagement melalui interaksi sosial, diskusi kritis, dan partisipasi aktif peserta (Dolan, 2022; Hidayah & Sujastika, 2024). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pendidikan politik partisipatif yang terdiri atas empat tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tim dosen melakukan identifikasi kebutuhan informasi masyarakat terkait isu kebijakan publik nasional. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi edukasi, koordinasi dengan narasumber, serta penyebaran informasi kegiatan kepada calon peserta.

2. Tahap Penyampaian Materi

Pada tahap ini, narasumber menyampaikan materi terkait konsep nasionalisme kerakyatan, strategi transformasi pemerintahan, Program Strategis Nasional (PSN), serta tantangan implementasinya dalam pembangunan nasional. Materi disampaikan menggunakan pendekatan ceramah interaktif agar peserta dapat memahami substansi pembahasan secara sistematis.

3. Tahap Dialog dan Diskusi Partisipatif

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dibahas. Dosen berperan sebagai moderator akademik yang menjaga objektivitas diskusi dan memastikan proses dialog berlangsung secara demokratis serta berbasis argumentasi ilmiah.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif dan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi peserta terhadap manfaat kegiatan.

HASIL

Berisi deskripsi tentang hasil dari proses pengabdian masyarakat, yaitu penjelasan tentang dinamika proses pendampingan (ragam kegiatan yang dilaksanakan, bentuk-bentuk aksi yang bersifat teknis atau aksi program untuk memecahkan masalah komunitas). Juga menjelaskan munculnya perubahan sosial yang diharapkan, misalnya munculnya pranata baru, perubahan perilaku, munculnya pemimpin lokal (local leader), dan terciptanya kesadaran baru menuju transformasi sosial, dan sebagainya.

Kegiatan dialog publik berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pemaparan materi maupun sesi diskusi. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi melalui kuesioner Google Form dengan skala Likert 1–5 yang diisi oleh 56 peserta pada akhir kegiatan. Berdasarkan evaluasi akhir kegiatan, peserta mengaku memperoleh tambahan wawasan mengenai isu kebijakan publik dan nasionalisme kerakyatan. Sebanyak 88% peserta menyatakan memahami konsep nasionalisme kerakyatan setelah mengikuti kegiatan, sedangkan 91% peserta menilai metode dialog publik efektif dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis dialog dan partisipasi aktif mampu meningkatkan civic engagement dan political awareness masyarakat (Hidayah & Sujastika, 2024; Jebarus & Sunarso, 2025).

Table 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Pendidikan Politik

No	Indikator Evaluasi	Persentase Peserta (%)
1	Memahami konsep nasionalisme kerakyatan setelah kegiatan	88
2	Memahami keterkaitan kebijakan publik dengan kesejahteraan masyarakat	85
3	Memperoleh wawasan baru mengenai Program Strategis Nasional (PSN)	82
4	Merasa lebih percaya diri untuk berdiskusi mengenai isu kebijakan publik	86
5	Menilai metode dialog publik efektif sebagai media pendidikan politik	91
6	Bersedia mengikuti kegiatan pendidikan politik serupa di masa mendatang	93

Tingginya persentase peserta yang menilai metode dialog publik efektif (91%) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan proses pembelajaran politik yang lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, 86% peserta mengaku lebih percaya diri berdiskusi mengenai isu kebijakan publik setelah kegiatan berlangsung.

PEMBAHASAN



Gambar 1 Pelaksanaan Dialog Publik tentang Strategi Transformasi Pemerintahan dalam Perspektif Nasionalisme Kerakyatan di Kota Mataram



Gambar 2 Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Peserta

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik

Kegiatan pengabdian berlangsung secara aktif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kehadiran akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum menciptakan ruang dialog yang inklusif untuk membahas isu-isu kebijakan publik yang sedang berkembang.

Peran dosen dalam kegiatan ini sangat penting sebagai agen pendidikan politik masyarakat. Dosen tidak hanya bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan materi secara ilmiah, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai perspektif yang muncul dalam diskusi. Peran tersebut sejalan dengan fungsi perguruan tinggi dalam membangun masyarakat yang kritis dan demokratis melalui transfer pengetahuan berbasis akademik.

Peran Dosen dalam Penguatan Civic Engagement

Tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa pendekatan dialog publik mampu menciptakan ruang civic engagement yang efektif. Pendidikan politik partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan civic engagement masyarakat melalui penguatan interaksi sosial, kesadaran kewargaan, dan partisipasi demokratis (Dolan, 2022; Hidayah & Sujastika, 2024). Dalam konteks digital, civic engagement juga berkembang melalui pemanfaatan ruang publik berbasis teknologi dan media digital (Suganda et al., 2025).

Dalam kegiatan ini, dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran sosial-politik yang mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap berbagai kebijakan publik. Peran tersebut sejalan dengan konsep civic engagement yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Melalui forum dialog publik, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, menguji argumentasi, dan mengembangkan kesadaran politik secara rasional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan politik yang partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi dan penguatan budaya politik demokratis.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa literasi politik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami kebijakan publik. Literasi politik memungkinkan masyarakat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan informasi yang valid dan argumentasi yang rasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa civic literacy dan political literacy berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat, termasuk dalam ruang demokrasi digital.

Peningkatan Literasi Politik Masyarakat

Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu transformasi pemerintahan dan kebijakan strategis nasional. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai implementasi Program Strategis Nasional, kebijakan hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta program kesejahteraan masyarakat.

Menurut Almond dan Verba (1989), literasi politik merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya budaya politik partisipatif. Melalui dialog publik, peserta memperoleh

kesempatan untuk memahami kebijakan pemerintah secara lebih komprehensif sehingga dapat mengurangi kecenderungan munculnya persepsi yang hanya didasarkan pada informasi parsial atau opini media sosial.

Civic literacy dan civic understanding memiliki pengaruh terhadap kemampuan individu dalam berpartisipasi pada ruang politik, termasuk dalam demokrasi digital (Cahyaningrum & Prasetyo, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa literasi politik berperan dalam meningkatkan kesadaran politik, kemampuan memahami kebijakan publik, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis (Rafla & Tetep, 2025; Jebarus & Sunarso, 2025).

Nasionalisme Kerakyatan dalam Perspektif Kebijakan Publik

Salah satu isu utama yang dibahas adalah konsep nasionalisme kerakyatan dalam kebijakan strategis pemerintah. Dalam diskusi dijelaskan bahwa nasionalisme kerakyatan dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, ketahanan pangan, penguatan industri nasional, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar peserta menilai bahwa program MBG, pengembangan koperasi desa, dan penguatan UMKM merupakan contoh implementasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peserta juga diajak untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan pengawasan publik.

Perspektif Kritis terhadap Program Strategis Nasional

Selain membahas aspek positif kebijakan pemerintah, dialog publik juga membuka ruang diskusi kritis mengenai berbagai potensi tantangan dalam implementasi Program Strategis Nasional. Beberapa peserta menyoroti kemungkinan munculnya permasalahan tata kelola, konflik agraria, serta dampak sosial dan lingkungan dari proyek pembangunan berskala besar.

Diskusi kritis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik yang baik tidak bertujuan membentuk dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan, melainkan

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara rasional berdasarkan informasi yang valid dan argumentasi yang logis (Nugroho, 2017).

Kontribusi Kegiatan terhadap Penguatan Demokrasi

Penguatan partisipasi publik melalui dialog deliberatif merupakan salah satu bentuk civic engagement yang mendukung demokrasi partisipatif dan keterlibatan warga negara dalam pengawasan kebijakan publik (Hidayah & Sujastika, 2024; Suganda et al., 2025). Kegiatan ini berhasil menciptakan ruang deliberasi publik yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Dialog yang berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan terhadap forum pendidikan politik yang netral, ilmiah, dan terbuka.

Keberadaan dosen sebagai fasilitator akademik memberikan kontribusi penting dalam menjaga kualitas diskusi agar tetap berorientasi pada penguatan literasi politik dan pengembangan budaya demokrasi yang sehat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam mendukung peningkatan partisipasi politik masyarakat secara substantif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui dialog publik mengenai strategi transformasi pemerintahan dalam perspektif nasionalisme kerakyatan berhasil menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan publik, memperluas wawasan politik masyarakat, serta mendorong tumbuhnya budaya diskusi yang kritis dan konstruktif.

Peran dosen sebagai narasumber, fasilitator, dan mediator akademik terbukti penting dalam menciptakan proses pembelajaran politik yang objektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi menunjukkan kontribusinya dalam memperkuat literasi politik masyarakat dan mendukung pembangunan demokrasi yang partisipatif.

Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat agar dampak pendidikan politik dapat dirasakan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Sage Publications.
- Cahyaningrum, A. S., & Prasetyo, W. H. (2026). The influence of civic literacy, civic understanding, and civic tech on students' digital political participation. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 7(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article/view/103526>
- Dolan, P. (2022). Social support, empathy, social capital and civic engagement: Intersecting theories for youth development. *Education, Citizenship and Social Justice*, 17(3), 255–267. <https://doi.org/10.1177/17461979221136368>
- Erfain. (2025). Strategi Sipil Society dalam Pendidikan Politik Inklusif untuk Memperkuat Civic Engagement Generasi Z. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(4), 140–151. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i4.226>
- Hendrik, A., & Danial, E. (2021). Strategi Pembinaan Kader Politik melalui Literasi Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 42–47. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22399>
- Hidayah, Y., & Sujastika, I. (2024). Strengthening civic disposition to build civic engagement and political participation in civic education in Indonesia. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 5(2), 233–240. <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i2.9867>
- Jebarus, S., & Sunarso. (2026). The role of civic education in strengthening political literacy, political awareness, and political participation among university students: A case study at PGRI University Yogyakarta. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(2), 49–57. <https://doi.org/10.65310/kwh62432>
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Rafli, & Tetep. (2026). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Literasi Politik Mahasiswa di Era Media Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1). <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/42148>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Suganda, F. A., Sundawa, D., Budimansyah, D., & Sari, M. (2026). Digital civic engagement: Transforming the model of citizen involvement in the digital democracy era. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 7(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article/view/104394>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik* (Cet. 7). Grasindo.